

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam beberapa tahun terakhir, masalah pembiayaan pendidikan tinggi telah menjadi perhatian utama di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya permintaan akan pendidikan tinggi, model pinjaman pendidikan yang ada saat ini telah menarik perhatian sebagai solusi potensial untuk menjembatani kesenjangan antara kenaikan biaya pendidikan dan sumber daya keuangan yang terbatas. Student loan menawarkan cara bagi siswa untuk mengakses pendidikan tinggi tanpa harus menanggung beban keuangan secara penuh di awal, sehingga meningkatkan akses pendidikan bagi populasi yang lebih besar. Namun, efektivitas model student loan dalam konteks Indonesia masih belum banyak dieksplorasi. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam sistem student loan di Indonesia, menganalisis dampaknya terhadap pembiayaan pendidikan tinggi dan mengeksplorasi jalan potensial untuk perbaikan. Dengan menyoroti tantangan dan peluang yang ada saat ini, penelitian ini berupaya memberikan wawasan yang berharga bagi para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam

Sistem pendidikan tinggi di Indonesia telah berkembang secara signifikan selama bertahun-tahun. Secara historis, pendidikan tinggi di Indonesia sebagian besar diperuntukkan bagi kalangan elit, dengan akses terbatas untuk masyarakat umum. Namun, sejak pertengahan abad ke-20, terjadi pergeseran bertahap menuju demokratisasi dan perluasan kesempatan pendidikan tinggi. Pendirian universitas negeri dan swasta di seluruh nusantara membantu meningkatkan akses ke pendidikan tinggi untuk segmen populasi yang lebih besar. Terlepas dari kemajuan-kemajuan ini, tantangan seperti kendala pendanaan, jaminan kualitas, dan

kesenjangan dalam akses dan hasil pendidikan masih ada dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Menurut, pemerintah memainkan peran penting dalam mengatur dan mendanai institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Selain itu, (Hiller & Callender, 2013) mencatat pentingnya mengatasi tantangan-tantangan ini untuk memastikan bahwa pendidikan tinggi di Indonesia terus maju dan berkontribusi pada pembangunan nasional.

Pinjaman pendidikan di Indonesia menghadapi beberapa tantangan kelayakan, terutama dalam konteks inflasi. Berikut adalah faktor-faktor utama yang menjelaskan mengapa pinjaman student loan ini sangat sulit dilakukan di Indonesia

Inflasi mengikis nilai uang dari waktu ke waktu. Dalam lingkungan dengan inflasi yang tinggi, nilai riil dari pembayaran pinjaman meningkat, sehingga lebih sulit bagi peminjam untuk melunasi pinjaman mereka. Hal ini dapat menyebabkan tingkat gagal bayar yang lebih tinggi di antara siswa yang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang baik segera setelah lulus.

Inflasi sering kali menyertai ketidakstabilan ekonomi. Ketidakpastian ekonomi dapat menghalangi lembaga keuangan untuk menawarkan pinjaman mahasiswa karena meningkatnya risiko gagal bayar. Bagi mahasiswa, pasar kerja yang tidak stabil berarti pendapatan di masa depan yang tidak menentu, sehingga membuat prospek untuk mengambil utang menjadi lebih berisiko.

Untuk mengimbangi inflasi, pemberi pinjaman dapat mengenakan suku bunga yang lebih tinggi pada pinjaman mahasiswa. Suku bunga yang lebih tinggi meningkatkan biaya pinjaman, sehingga pinjaman menjadi kurang terjangkau bagi mahasiswa. Beban pembayaran bunga yang tinggi dapat menghalangi siswa untuk mengejar pendidikan yang lebih tinggi, mengalahkan tujuan pinjaman siswa.

Inflasi dapat menyebabkan kondisi kredit yang lebih ketat. Lembaga keuangan dapat menjadi lebih konservatif dalam praktik pemberian pinjaman mereka, sehingga mengurangi akses pinjaman bagi siswa. Hal ini membatasi ketersediaan dana bagi mereka yang membutuhkannya untuk membiayai pendidikan mereka.

Meskipun upah nominal meningkat, inflasi yang tinggi dapat menyebabkan stagnasi atau bahkan penurunan pendapatan riil. Jika upah lulusan tidak dapat mengikuti inflasi, kemampuan mereka untuk membayar pinjaman akan berkurang. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan keuangan dan meningkatkan kemungkinan gagal bayar.

Inflasi yang tinggi sering kali mengakibatkan depresiasi mata uang lokal. Bagi siswa yang berencana untuk belajar di luar negeri atau yang harus membayar pinjaman dalam mata uang asing, depresiasi ini meningkatkan biaya riil pinjaman mereka, sehingga kurang layak.

Pemerintah di lingkungan dengan inflasi tinggi akan mengalami kekurangan sumber daya untuk mensubsidi pinjaman mahasiswa secara efektif. Tanpa subsidi, pinjaman menjadi lebih mahal bagi siswa. Selain itu, kerangka kerja kelembagaan yang lemah mungkin gagal memberikan dukungan dan perlindungan yang memadai bagi pemberi pinjaman dan peminjam.

Inflasi yang tinggi membuat tabungan dan investasi menjadi tidak menarik karena ketidakpastian dan erosi daya beli. Hal ini berdampak pada kemampuan keluarga siswa untuk menabung untuk pendidikan dan ketersediaan dana bagi lembaga pemberi pinjaman untuk menawarkan pinjaman siswa. Inflasi yang tinggi secara terus-menerus dapat menyebabkan ekspektasi inflasi yang lebih tinggi. Jika siswa dan keluarga memperkirakan inflasi yang berkelanjutan, mereka mungkin kurang bersedia untuk mengambil utang, karena mengetahui bahwa pembayaran di masa depan akan lebih memberatkan. Hal ini akan mengurangi permintaan pinjaman mahasiswa.

Model proposal student loan yang ada saat ini di Indonesia menghadapi beberapa tantangan yang menghambat efektivitasnya dalam membiayai pendidikan tinggi bagi mahasiswa. Proposal student loan yang ada saat ini tidak memiliki cakupan yang komprehensif, dimana banyak mahasiswa yang tidak dapat mengakses pinjaman karena kriteria kelayakan yang ketat. Selain itu, jumlah pinjaman yang ditawarkan seringkali tidak mencukupi untuk menutupi kenaikan biaya pendidikan, biaya hidup, dan pengeluaran terkait pendidikan lainnya. Selain itu, persyaratan pembayaran untuk pinjaman ini sangat ketat dan dapat menjadi beban bagi lulusan yang sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil di pasar kerja yang kompetitif. Oleh karena itu, diperlukan reformasi untuk membuat model pinjaman pendidikan yang lebih inklusif, fleksibel, dan berkelanjutan. Dengan mengatasi masalah-masalah ini, Indonesia dapat lebih mendukung para pelajarnya untuk menempuh pendidikan tinggi dan pada akhirnya dapat berkontribusi pada pembangunan sosial-ekonomi negara dalam jangka panjang. (Elza Elmira & Suryadrama, 2018)

Penting untuk mengetahui berbagai tantangan yang dihadapi mahasiswa dalam mengakses pinjaman pendidikan untuk membiayai pendidikan tinggi mereka di Indonesia. Salah satu kendala yang signifikan adalah kurangnya literasi keuangan di kalangan mahasiswa, yang dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang buruk dan salah dalam mengelola dana pinjaman. Selain itu, proses pengajuan pinjaman dana pendidikan yang rumit dan birokratis dapat menghalangi banyak mahasiswa untuk mengajukan pinjaman. Selain itu, kriteria kelayakan yang ketat yang ditetapkan oleh lembaga keuangan dapat mengecualikan siswa dari latar belakang berpenghasilan rendah atau mereka yang tidak memiliki riwayat kredit yang kuat. Tantangan-tantangan ini berkontribusi pada melebarnya kesenjangan dalam kesempatan pendidikan antara berbagai kelompok sosial-ekonomi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan komprehensif yang mencakup peningkatan program literasi keuangan, penyederhanaan proses pengajuan pinjaman, dan penerapan kriteria kelayakan yang lebih

fleksibel untuk memastikan akses yang adil terhadap pinjaman pendidikan bagi semua calon mahasiswa.

Ada beberapa peluang untuk memperbaiki sistem pinjaman pendidikan di Indonesia agar pendidikan tinggi lebih mudah diakses dan terjangkau oleh mahasiswa. Pertama, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan ketersediaan beasiswa dan hibah berbasis kebutuhan untuk mengurangi ketergantungan pada pinjaman untuk membiayai pendidikan. Selain itu, menerapkan rencana pembayaran berbasis pendapatan dapat meringankan beban pembayaran bagi lulusan, memastikan bahwa pembayaran pinjaman dapat dikelola berdasarkan pendapatan individu. Selain itu, menciptakan kemitraan dengan lembaga keuangan swasta untuk menawarkan suku bunga yang lebih rendah atau opsi pembayaran yang lebih fleksibel dapat membuat pinjaman mahasiswa lebih menarik dan layak bagi mahasiswa. Dengan menjajaki berbagai peluang ini, sistem pinjaman mahasiswa di Indonesia dapat ditingkatkan untuk lebih mendukung mahasiswa dalam menempuh pendidikan tinggi dan pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan dan pertumbuhan negara dalam jangka panjang.

Kesimpulannya, pengajuan model student loan untuk membiayai pendidikan tinggi di Indonesia menghadirkan peluang dan tantangan. Di satu sisi, model ini dapat memberikan akses yang lebih besar terhadap pendidikan tinggi bagi siswa yang mungkin tidak memiliki kemampuan finansial untuk membiayainya di muka. Hal ini pada akhirnya dapat menghasilkan tenaga kerja yang lebih terdidik dan terampil, sehingga menguntungkan perekonomian secara keseluruhan. Namun, efektivitas model seperti ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengatur sistem dengan baik, memastikan suku bunga yang adil, dan menerapkan kebijakan yang melindungi siswa agar tidak terjebak dalam jebakan utang. Selain itu, pola pikir masyarakat terhadap utang dan pinjaman di Indonesia dapat menjadi penghalang bagi penerimaan dan keberhasilan model student loan secara luas. Penelitian dan analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami sepenuhnya implikasi dari penerapan model ini dalam

konteks Indonesia. Pendekatan komprehensif yang melibatkan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan lembaga pendidikan, akan sangat penting untuk keberhasilan implementasi dan keberlanjutan model student loan di Indonesia (Elza Elmira dan Suryadarma, 2018).

Penelitian yang terdahulu pada Chapman (2013) misalnya hanya ada pada level konseptual dan tidak ada pembuktian empirik, atau pada Riset yang dilakukan Elmira dan Suryadarma yang menjadi riset yang paling dekat dengan penelitian ini hanya terbatas pada data sekunder yang agregat tanpa melihat keakuratan data primer, pada konteks tersebut student loan menjadi feasible karena tidak memperhitungkan laju naiknya biaya pendidikan, variansi beban pembayaran, jumlah beban pembayaran setiap program studi dan mengasumsikan bahwa pendapatan daerah dapat membayar pinjaman. Kedua penelitian tersebut juga tidak mengindahkan fleksibilitas pembayaran yang mungkin saja membantu debitur ketika mengalami masa sulit. Studi Nahdi et al (2024) memang terlihat ambisius dari segi hasil namun sekali lagi penelitian ini memiliki kekurangan dalam pembuktian empiris, dan tanpa mengkaji bahwa pinjaman berbasis kontijensi pendapatan yang dilakukan di Australia bisa dilakukan di Indonesia tanpa adaptasi. Mengingat postur ekonomi kita yang memiliki dana terbatas tidak seperti negara maju membuat pemerintah perlu mengundang pihak ketiga sebagai penyedia dana. Hal hal ini yang kurang diperhatikan dalam penelitian terdahulu

Urgensi dari penelitian ini adalah menemukan model pinjaman bagi mahasiswa yang kurang mampu untuk dapat melanjutkan studinya, diharapkan dengan adanya model ini dapat menjadi bahan kajian dan pertimbangan bagi pihak regulator untuk dapat menurunkan angka putus sekolah di perguruan tinggi yang diakibatkan kekurangan dana.

Menurut Chapman (2013) Pinjaman mahasiswa harus menjadi kebijakan nasional untuk meringankan beban mahasiswa, meningkatkan pengembangan tenaga kerja, dan

mendorong pertumbuhan ekonomi. Tanpa pendekatan yang terkoordinasi, solusi yang dilakukan oleh masing-masing negara akan kurang konsisten dan efektif, sehingga memperparah krisis utang mahasiswa dan menghambat mobilitas sosial-ekonomi. Kebijakan nasional memastikan akses yang adil terhadap pendidikan, mendorong inovasi, dan mengembangkan tenaga kerja terampil yang penting bagi kemakmuran nasional.

Sebagai catatan bahwa riset ini berangkat dari tesis bahwa proposal model pinjaman mahasiswa yang ada saat ini di Indonesia tidak memadai dalam menyediakan akses yang adil terhadap pendidikan tinggi untuk semua kelompok sosial ekonomi (Chapman, 2013). Analisis data menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam distribusi pinjaman di antara mahasiswa dari berbagai kelompok pendapatan, yang mengindikasikan perlunya reformasi dalam sistem tersebut. Berdasarkan penelitian tersebut, direkomendasikan agar pemerintah mengeksplorasi mekanisme pembiayaan alternatif yang lebih inklusif dan dapat diakses oleh semua siswa, terlepas dari latar belakang keuangan mereka. Selain itu, diperlukan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam administrasi pinjaman mahasiswa untuk memastikan bahwa dana dialokasikan secara adil dan efektif. Dengan mengatasi masalah-masalah ini, Indonesia dapat bekerja untuk menciptakan model yang lebih adil dan berkelanjutan untuk membiayai pendidikan tinggi, yang pada akhirnya akan mendorong mobilitas sosial dan pembangunan ekonomi yang lebih baik di Indonesia.

Pendidikan merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sebagai hak asasi manusia. Namun, kesenjangan di sektor pendidikan di berbagai daerah di Indonesia cukup signifikan (Fitri, 2021). Mengingat bahwa pendidikan menghasilkan sumber daya baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, maka alokasi pendidikan yang adil lebih diinginkan daripada pemerataan pendapatan atau aset. Oleh karena itu, Pemerintah harus menjamin akses pendidikan yang merupakan hak warga negara, jika pemerintah tidak mengelola kebijakan ini dengan tepat maka hal dapat mengganggu

ketidakberpihakan dan kesesuaian kebutuhan industri. Berdasarkan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sistem pendidikan tinggi di Indonesia terdiri dari beberapa kategori berikut: (1) Akademi, (2) Politeknik, (3) Sekolah Tinggi, (4) Institut, dan (5) Universitas. Akademi hanya menawarkan pengajaran dalam satu bidang khusus, seperti sains, teknik, atau seni. Politeknik sebagian besar menekankan pada pendidikan praktis atau pengetahuan khusus. Sementara itu, sekolah lanjutan, mirip dengan akademi, memprioritaskan dan fokus lebih intensif pada bidang studi tertentu. Institusi memprioritaskan bidang keahlian tertentu. Universitas terutama berfokus pada penyediaan instruksi khusus dan studi akademik lanjutan dalam berbagai mata pelajaran. Hendrian (2024) menyatakan dalam studinya bahwa institusi swasta memiliki kehadiran yang dominan di sebagian besar institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Namun, pemerintah hanya mengelola 3,5 persen dari mereka.

Sebelum membahas pendidikan di Indonesia secara khusus, mari kita melihat mengapa perhatian terhadap tren dan masalah pendidikan harus menjadi perhatian utama bagi setiap negara yang sedang menjalankan agenda pembangunan. Jika kita berbicara hubungan dan antara Pendidikan dan pertumbuhan ekonomi, maka kita harus menilik literatur tentang topik ini secara khusus yang berbicara sumbangsih pendidikan tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, termasuk hubungan antara pendidikan dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan yaitu pertumbuhan penduduk yang berkelanjutan, produktivitas tenaga kerja, dan penyerapan tenaga kerja seperti pada studi yang dilakukan oleh Hendrizal et al (2024) dan Azzahra et al (2024). Satu hal yang penting dari literatur yang dilakukan oleh Azzahra et al (2024) adalah bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting bukan saja untuk memajukan aspek pembangunan yang berhubungan dengan tenaga kerja dan non-tenaga kerja tetapi juga pada perbaikan kesenjangan ekonomi. Yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan adalah waktu investasi dalam pendidikan, menyiapkan rencana jangka Panjang jauh lebih baik guna membangun tenaga kerja yang terampil, karena perlu waktu yang panjang



dalam mentranformasikan lulusan sekolah menjadi tenaga kerja yang lebih produktif (Barro, 2013).

Meskipun organisasi swasta di Indonesia memiliki jumlah sekolah yang lebih banyak dibandingkan dengan sekolah negeri, beberapa di antaranya menghadapi masalah dengan kualitas pendidikan (Fitri, 2021). Di negara-negara industri, individu-individu di sektor swasta memiliki akses ke sistem pendidikan yang unggul dan lingkungan belajar yang kondusif. Akibatnya, persyaratan institusi milik swasta semakin meningkat. Namun, situasi sebaliknya terjadi di Indonesia. Dalam situasi ini, sekolah swasta dianggap sebagai pilihan kedua setelah sekolah negeri (Suryadarma dan Jones, 2013). Banyak negara industri memprioritaskan pendidikan tinggi karena adanya korelasi yang kuat dan cukup besar antara investasi di pendidikan pascasekolah menengah dan daya saing ekonomi suatu negara. Negara-negara berkembang menghadapi dilema terkait alokasi sumber daya keuangan. Negara-negara tersebut harus memutuskan apakah akan memprioritaskan investasi dalam pendidikan tinggi atau menggunakan sumber daya ini untuk sektor lain seperti meningkatkan layanan kesehatan dan mengurangi kemiskinan. Riset ini menyelidiki tantangan yang dihadapi oleh pendidikan tinggi di Indonesia yang merupakan negara berkembang dan menjelaskan alasan di balik perdebatan sengit seputar topik- student loan di Indonesia, dimana student loan diharapkan dapat memberi stimulus secara positif secara jangka panjang pada perekonomian negara.

Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua anak usia sekolah dasar dapat menyelesaikan pendidikan dasar mereka, tanpa mengesampingkan kualitas pengalaman pendidikan bagi mereka yang telah menyelesaikannya. Adalah sebuah tragedi bahwa pada dekade kedua abad ke-21, beberapa anak di Indonesia tidak menyelesaikan pendidikan masuk ke dunia kerja sebagai pekerja yang terampil. Pada pertengahan abad ini, anak-anak tersebut masih akan berada di dunia kerja sebagai pekerja yang berpendidikan rendah, sehingga menurunkan tingkat produktivitas secara keseluruhan.

Selama lima tahun terakhir, meskipun telah terjadi peningkatan yang konsisten dalam tingkat pendaftaran, akses dan keterlibatan masyarakat pedesaan dan kelompok minoritas tertentu masih berada dalam kondisi kritis. Terlepas dari banyaknya lembaga pendidikan tinggi swasta di Indonesia, penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri sangat kompetitif, dan hanya sebagian kecil pelamar yang berhasil diterima. Jumlah tempat yang tersedia terbatas hingga 75.000, meskipun sekitar 450.000 siswa mengikuti ujian masuk universitas negeri setiap tahunnya (Setiawan, 2020). Karena ketatnya persaingan dalam sistem ujian masuk universitas negeri di Indonesia, calon mahasiswa diharuskan untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi daripada saingan mereka.

Nizam (2016) berpendapat bahwa agar berhasil lulus ujian, peserta didik membutuhkan akses ke sekolah menengah atas yang unggul dan pengajaran khusus lebih lanjut di Lembaga swasta. Namun demikian, sekolah swasta ini terletak di daerah perkotaan dan secara eksklusif melayani siswa dari keluarga kaya yang memiliki kemampuan finansial untuk mendapatkan pelatihan tambahan. Selain itu, hanya 3,3 persen siswa dari kelompok pendapatan 20 persen terendah yang berhasil menyelesaikan ujian. Sebaliknya, persentase siswa dari kuintil ekonomi teratas yang berhasil mendapatkan kursi di universitas sangat tinggi, mencapai 31 persen. Buchori dan Malik (2014) mengamati bahwa individu yang tidak berhasil masuk ke universitas negeri memilih untuk melanjutkan studi mereka di universitas swasta, yang sebagian besar berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang lebih rendah. Potensi ketidaksetaraan muncul ketika mayoritas siswa yang dapat masuk ke perguruan tinggi negeri berasal dari latar belakang sosial-ekonomi yang kaya. Setelah universitas negeri menjadi organisasi legal, mereka tidak akan lagi menerima dana operasional dari pemerintah pusat. Sebaliknya, pendanaan mereka akan diberikan melalui sistem hibah yang bergantung pada kinerja mereka. Selain itu, manajemen institusi publik tidak tunduk pada kontrol pemerintah atau menteri pendidikan nasional, karena mereka bertransisi menuju sistem penerimaan mahasiswa yang lebih privat.

Sebagai ilustrasi menurut Logli (2016), Universitas Gadjah Mada, yang merupakan salah satu universitas negeri yang diakui secara resmi, telah memulai ujian masuk secara otonom mulai tahun 2003. Jalur masuk ini dapat disamakan dengan jalur masuk universitas swasta, karena memerlukan investasi keuangan tambahan. Siswa yang mendaftar di fakultas kedokteran dapat menyumbangkan maksimal Rp 100 juta (US\$ 7.143), sementara fakultas sains membutuhkan komitmen minimum Rp 8 juta (US\$ 571). Situasi ini merupakan tantangan yang signifikan bagi mereka yang berasal dari latar belakang sosial-ekonomi yang kurang beruntung, terutama mengingat terbatasnya ketersediaan beasiswa. Saat ini, proporsi mahasiswa yang menerima beasiswa adalah sekitar 11 persen dari seluruh populasi mahasiswa (Chapman, 2013).

Pendidikan perguruan tinggi sebelumnya hanya diperuntukkan bagi segelintir orang di Indonesia, namun kini dianggap penting oleh sebagian besar orang tua untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, jumlah siswa yang mendaftar di tingkat ini meningkat dengan cepat. Kualitas pendidikan menengah pertama sangat berpengaruh terhadap kinerja di tingkat yang lebih tinggi. Jika ketersediaannya terbatas atau kualitasnya tidak memuaskan, seperti yang sering terjadi di daerah pedesaan yang lebih terisolasi, maka kesempatan untuk maju bagi banyak anak muda akan terhambat. Hal ini memiliki dampak yang tidak menguntungkan, tidak hanya bagi kaum muda itu sendiri, tetapi juga bagi perekonomian secara keseluruhan, karena distribusi bakat dalam suatu populasi tidak terbatas pada penduduk perkotaan atau mereka yang orang tuanya lebih makmur.

Namun, masalah kesetaraan akses terhadap pendidikan masih menjadi masalah yang sangat serius di Indonesia (Harahap, Maipita, dan Rahmadana, 2020). Untungnya, tidak ada lagi banyak bukti tentang ketidaksetaraan akses berdasarkan jenis kelamin yang dulu menjadi ciri khas Indonesia dan terus menjadi ciri khas negara-negara Asia Selatan. Namun, angka-angka mengenai kelanjutan pendidikan berdasarkan latar belakang sosial ekonomi sangat

memprihatinkan. Ada kebutuhan untuk menurunkan biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh keluarga miskin, meningkatkan kualitas sekolah yang mereka masuki, dan memberikan subsidi kepada siswa-siswa berprestasi dari keluarga miskin, khususnya pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Azzahra et al, 2024). Patut dicatat bahwa studi yang dilakukan menyatakan bahwa data menunjukkan kecenderungan tingkat pengembalian investasi dari pendidikan dasar saat ini mungkin lebih rendah daripada tingkat pengembalian dari tingkat pendidikan pascasekolah dasar (Colclough et al, 2009). Salah satu kekhawatirannya adalah bahwa hal ini mungkin terjadi karena ketimpangan sosial. Isu-isu tersebut perlu dipertimbangkan secara serius dalam konteks Indonesia.

Sektor pendidikan tinggi sedang mengalami transformasi di seluruh dunia (Bromley et al, 2023). Jelas terlihat dari serangkaian inisiatif kebijakan yang sedang diperdebatkan dan diimplementasikan bahwa pemerintah memiliki kepedulian untuk memenuhi kebutuhan sosio-ekonomi di tingkat lokal dan nasional, dan pada saat yang sama, mereformasi sistem universitas untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dan menghasilkan penelitian yang bermutu dalam konteks sistem pendidikan tinggi yang mengglobal. Massifikasi pendidikan tinggi yang sedang berlangsung mencerminkan meningkatnya permintaan akan pendidikan tinggi seiring dengan semakin pentingnya pengetahuan dalam memacu pertumbuhan ekonomi, ditambah dengan meningkatnya permintaan untuk memperlakukan pendidikan tinggi sebagai instrumen mobilitas sosial. Pertumbuhan partisipasi sektor swasta yang cukup tinggi dalam satu dekade terakhir ini telah mendukung peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi menjadi sekitar 27% (Rifai, 2019). Kenyataan suram bahwa ekspansi ini tidak disertai dengan peningkatan kualitas yang sepadan telah menjadi sumber ketidaknyamanan bagi pemerintah. Meskipun peran pembiayaan publik untuk pendidikan tinggi tidak dapat dipungkiri, masalahnya adalah bagaimana meningkatkan tata kelola untuk meningkatkan kualitas dan memanfaatkan sumber daya, baik sumber daya manusia, keuangan, maupun fisik sebaik

mungkin. Makalah ini membahas berbagai modus pendanaan negara untuk pendidikan tinggi dan dampaknya terhadap tata kelola lembaga pendidikan tinggi.

Indonesia terpukul dengan angka partisipasi pendidikan tinggi (APK) yang rendah; Unesco (2018) mengungkapkan bahwa hanya 36 persen pada 2017. Jika kita terlihat seperti Inggris, Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, dan Kanada, Negara negara ini memberikan banyak bantuan keuangan dan beasiswa; Sayangnya, di Indonesia tidak seperti itu dapat dilihat dengan beasiswa LPDP yang hanya menasar pada pascasarjana, padahal APK strata 1 masih sangat rendah dan tingginya angka drop out pada jenjang strata 1 (Elmira dan Suryadarma, 2020). Ada peningkatan biaya pendidikan tinggi di seluruh dunia. Pembagian biaya pendidikan tinggi antara sumber publik dan swasta bervariasi di setiap negara. Di sebagian besar negara, terdapat upaya pemerintah untuk mengalihkan biaya pendidikan tinggi yang meningkat dari sumber-sumber publik ke sumber-sumber swasta. Dalam hal ini, meningkatnya biaya pendidikan tinggi dan ketergantungan pada sumber pendanaan non-pemerintah menjadi ciri perkembangan pendidikan tinggi di masa lalu. Dilema yang biasa dihadapi oleh penduduk usia muda adalah dorongan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di satu sisi dan tingginya biaya swasta untuk menempuh pendidikan tinggi di sisi lain. Tidak diragukan lagi bahwa kenaikan biaya kuliah telah melebihi tingkat inflasi dan tingkat kenaikan pendapatan keluarga. Sebagai contoh, biaya kuliah untuk pendidikan empat tahun negeri di Amerika Serikat adalah \$358 per semester pada tahun 1970. Seharusnya biaya tersebut menjadi USD 2052 pada tahun 2010 jika inflasi diperhitungkan. Namun, biaya kuliah rata-rata di perguruan tinggi negeri meningkat tiga kali lipat menjadi USD 6695 (Mintz, 2021).

Peningkatan biaya pendidikan tinggi memiliki dua dimensi. Pertama, eskalasi biaya akibat kenaikan gaji pegawai pendidikan tinggi (termasuk guru) dan investasi infrastruktur untuk menyediakan pendidikan tinggi. Kedua, pengalihan beban biaya pendidikan dari pemerintah ke rumah tangga. Dukungan negara terhadap pendidikan tidak dapat mengimbangi

peningkatan permintaan masyarakat terhadap pendidikan tinggi, dan hal ini mengakibatkan meningkatnya beban keuangan rumah tangga (Bleemer et al, 2021). Diperkirakan bahwa di beberapa negara seperti Amerika Serikat, pengurangan subsidi untuk pendidikan tinggi mencapai USD 7 miliar antara tahun 2008 dan 2018 (Johnson, 2019). Penurunan subsidi ini menimbulkan masalah terkait kesetaraan dalam akses ke pendidikan tinggi dan keberlanjutan pendanaan publik untuk pendidikan tinggi.

Argumen yang mendukung pendanaan publik untuk pendidikan tinggi didasarkan pada dua set argumen. Argumen pertama berasal dari sudut pandang rasionalitas ekonomi dan dibenarkan oleh kerangka kerja tingkat pengembalian investasi dalam pendidikan tinggi. Hingga tahun 1990-an, diyakini bahwa tingkat pengembalian marjinal berbanding terbalik dengan tingkat pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan dasar dianggap memberikan keuntungan yang lebih tinggi, dan karenanya, pendidikan dasar diprioritaskan untuk investasi publik daripada tingkat pendidikan lainnya. Lembaga-lembaga internasional yang dipimpin oleh Bank Dunia memainkan peran penting dalam mengalihkan alokasi dari pendidikan tinggi ke pendidikan dasar, terutama di bawah rezim penyesuaian struktural (World bank, 1986). Namun, pada tahun 1990-an, ditemukan bahwa pengembalian investasi pada pendidikan tinggi telah meningkat, dan melampaui tingkat pendidikan lainnya (Bank Dunia, 1994). Oleh karena itu, argumen ekonomi pada tahun-tahun berikutnya mendukung peningkatan investasi publik dalam pendidikan tinggi. Meskipun kerangka kerja tingkat pengembalian diandalkan untuk melegitimasi pengalihan sumber daya publik dari pendidikan tinggi ke pendidikan dasar, secara mengejutkan, argumen yang sama tidak digunakan untuk meningkatkan alokasi untuk pendidikan tinggi ketika tingkat pengembalian investasi di pendidikan tinggi melampaui tingkat pendidikan lainnya.

Premis kedua untuk investasi publik yang berkelanjutan berasal dari argumen kesetaraan sosial. Gelar pendidikan tinggi merupakan persyaratan masuk yang diperlukan

untuk memasuki pasar kerja. Jika akses ke pendidikan tinggi tidak terdistribusi secara merata, maka hal ini dapat menjadi sumber ketidaksetaraan ekonomi pada generasi berikutnya. Banyak negara menerapkan kebijakan pemerataan untuk memastikan bahwa kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi lebih merata. Kebijakan reservasi atau sistem kuota dalam penerimaan mahasiswa baru yang berpihak pada kelompok yang kurang beruntung merupakan salah satu contoh dari masalah kesetaraan. Meskipun para ekonom (Musgrave, 1969) berargumen bahwa tingkat investasi publik yang lebih tinggi pada tingkat pembangunan ekonomi yang lebih rendah dan tingkat investasi publik yang lebih rendah pada tingkat pembangunan ekonomi yang lebih tinggi ketika pengeluaran swasta akan dapat melengkapi, hal ini perlu dikaji dalam konteks penargetan investasi publik.

Menarik untuk dicatat bahwa tren pengeluaran pemerintah untuk pendidikan tinggi tidak selalu mengikuti apa yang dikemukakan oleh para ekonom. Bukti empiris menunjukkan tiga pola dalam pembiayaan pendidikan tinggi: (a) peningkatan porsi anggaran pendidikan dan peningkatan porsi pendidikan tinggi dalam anggaran pendidikan; (b) peningkatan porsi anggaran pendidikan dan penurunan porsi anggaran pendidikan tinggi; dan (c) penurunan porsi anggaran pendidikan dan anggaran pendidikan tinggi (Varghese, 2009). Persyaratan dalam pinjaman penyesuaian struktural memaksa banyak negara berkembang untuk mengalihkan sumber daya publik dari pendidikan tinggi ke pendidikan dasar. Karena negara-negara maju bukan penerima pinjaman penyesuaian struktural, penurunan alokasi untuk pendidikan tinggi lebih banyak terjadi di negara berkembang. Dengan demikian, berlawanan dengan argumen ekonomi, pangsa pendidikan tinggi dalam anggaran pendidikan meningkat di negara-negara maju dan di negara-negara berkembang menurun pada dekade akhir abad yang lalu. Tren lain yang menarik pada akhir abad yang lalu adalah konvergensi dalam sudut pandang untuk mengurangi pendanaan publik untuk pendidikan tinggi baik di negara maju maupun negara berkembang. Inisiatif jalur cepat dan persyaratan pendanaan eksternal memastikan bahwa

minimal 50% dari pengeluaran publik untuk pendidikan harus diinvestasikan pada tingkat pendidikan dasar. Dengan tidak adanya dana publik yang tersedia, sebagian besar negara mengadopsi reformasi yang ramah pasar untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat akan sistem pendidikan tinggi yang berkembang.

Kebijakan untuk mereformasi lembaga-lembaga yang didanai pemerintah akan terdiri dari dua bidang utama, yaitu langkah-langkah reformasi yang berkaitan dengan pendanaan dan peraturan untuk meningkatkan tata kelola universitas. Meskipun dasar pemikiran untuk dukungan pemerintah untuk pendidikan, secara umum, berasal dari penciptaan eksternalitas dan kepedulian terhadap pemerataan, dua pertanyaan utama yang perlu dijawab dalam menentukan mekanisme pendanaan adalah: apa yang didanai dan bagaimana cara mendanai (Jongbloed, 2007). Dalam model pendanaan tradisional, pendekatan kebijakan yang digunakan adalah dengan menentukan jumlah pendanaan berdasarkan negosiasi dengan pos-pos anggaran, seperti gaji, perawatan, dan beasiswa. Inilah yang disebut dengan pendanaan berbasis input. Dalam sistem seperti ini, para guru seharusnya termotivasi secara intrinsik untuk memberikan yang terbaik sesuai dengan potensi mereka. Secara umum dikatakan bahwa dengan tidak adanya mekanisme akuntabilitas baik dalam bentuk pemulihan biaya dari pasar atau penegakan beberapa penilaian obyektif terhadap kinerja fakultas, pelaksanaan pengajaran dan penelitian akan tetap kurang optimal yang mengakibatkan pemborosan dan penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Konsep efisiensi dalam pendidikan agak samar-samar, dan sering kali tidak dapat dimengerti oleh para pemangku kepentingan. Karena lembaga nirlaba tidak memiliki tujuan memaksimalkan keuntungan, kekuatan pendorong untuk sistem ini adalah memaksimalkan prestise. Namun, hanya lembaga-lembaga dengan peringkat teratas yang didorong oleh tujuan maksimalisasi gengsi karena lembaga-lembaga yang berada di bawah peringkat tersebut mungkin tidak mengasosiasikan gengsi dengan apa yang mereka lakukan. Hal ini belum tentu berlaku untuk sektor swasta jika tidak ada pendanaan dari sektor publik.



Meskipun di atas kertas, pengambilan keuntungan tidak diperbolehkan, lembaga-lembaga yang didanai swasta tetap terlibat dalam mencapai efisiensi, minimalisasi biaya dengan output tertentu atau maksimalisasi output dengan biaya tertentu (George & Chattopadhyay, 2012). Oleh karena itu, masalahnya adalah bagaimana mengubah cara pendanaan untuk mengatasi ketidakefisienan yang melekat dalam penggunaan sumber daya dalam menjalankan fungsi universitas negeri ini. Oleh karena itu, untuk memastikan akuntabilitas kepada masyarakat dan memberi insentif kepada para pelaku untuk memberikan hasil, kecenderungannya adalah bergeser ke arah penganggaran berbasis kinerja di mana pengeluaran dana dibuat tergantung pada kinerja para pemangku kepentingan yang tercermin dalam hasil dari lembaga-lembaga tersebut.

Student loan adalah metode populer lainnya untuk berbagi biaya pendidikan tinggi dengan siswa/orang tua. Student loan merupakan mekanisme untuk mengalihkan beban keuangan untuk menempuh pendidikan tinggi kepada keluarga atau individu siswa. Banyak negara berkembang yang memulai skema pinjaman mahasiswa pada tahun 1960-an. Pinjaman ini memungkinkan peminjam untuk menghindari pembayaran di muka untuk pendidikan tinggi (baik untuk biaya kuliah atau biaya hidup) dengan menunda pembayaran - pembayaran dari penghasilan setelah lulus. Program pinjaman mahasiswa menjadi populer di banyak negara. Program pinjaman mahasiswa dapat berupa pinjaman kontinjensi pendapatan dan skema pinjaman yang dioperasikan oleh pemerintah atau skema pinjaman yang dioperasikan oleh bank komersial. Pinjaman kontinjensi pendapatan (ICL) beroperasi di Inggris dan Australia. Mahasiswa membayar kembali pinjaman hanya ketika mereka dapat memperoleh sejumlah pendapatan. Sebagai langkah pengamanan, peminjam yang mendapatkan ICL tidak dapat membayar lebih dari persentase tertentu dari penghasilannya sebagai jumlah pembayaran. Kenaikan tajam dalam biaya siswa di Inggris, seperti di banyak negara, dibayar oleh siswa

melalui pinjaman siswa. Pinjaman mahasiswa juga membantu institusi swasta untuk memperluas pendaftaran mereka bahkan ketika tingkat biaya tinggi.

Ada dua tahap dalam pelaksanaan pinjaman mahasiswa. Pinjaman mahasiswa pada awalnya tidak populer di banyak negara. Oleh karena itu, pemerintah mengambil inisiatif untuk memberikan pinjaman. Tahap pertama adalah pinjaman mahasiswa yang didanai pemerintah, dan pinjaman ini tetap populer pada tahun 1970-an dan 1980-an. Pada saat itu, pemerintah memberikan pinjaman yang sebagian besar dalam bentuk pinjaman jasa dan sebagian besar dimanfaatkan oleh siswa yang membutuhkan. Namun, ditemukan bahwa banyak yang tidak membayar kembali pinjaman tersebut setelah masa studi mereka. Oleh karena itu, pemerintah mengurangi peran mereka dalam menyediakan pinjaman mahasiswa. Pada tahap kedua, pinjaman mahasiswa disediakan oleh lembaga-lembaga komersial dan bank. Bentuk pembiayaan ini telah muncul sebagai bentuk alternatif yang paling penting untuk pembiayaan pendidikan tinggi oleh pemerintah. Sejumlah besar siswa di banyak negara mengandalkan pinjaman mahasiswa untuk melanjutkan studi mereka yang lebih tinggi. Pinjaman mahasiswa telah menjadi populer di India. Pinjaman diambil dari bank-bank komersial untuk studi di India dan untuk mendukung program-program studi di luar negeri. Jumlah pinjaman kepada siswa telah meningkat di India. Jumlah total pinjaman meningkat dari 0.112 juta pada tahun 2000-01 menjadi 2.59 juta pada tahun 2013-14. Jumlah pinjaman pendidikan meningkat dari Rs. 1028 crores menjadi 70,282 crores selama periode yang sama (Rani, 2017). Tantangannya adalah untuk mengembalikan pinjaman mahasiswa. Pemulihan pinjaman global secara keseluruhan sangat rendah yaitu sebesar 39%. Masalah utama dari sisi mahasiswa adalah beban pinjaman kumulatif. Para ekonom memproyeksikan akumulasi hutang pinjaman mahasiswa sebesar \$2 triliun pada tahun 2021 dan sebanyak \$3 triliun pada akhir dekade ini (Johnson, 2018).

Pinjaman mahasiswa, awalnya secara informal dan dengan cakupan yang sangat terbatas, telah menjadi fitur pembiayaan pendidikan tinggi sejak universitas resmi pertama di

Eropa didirikan pada akhir abad kesebelas di Bologna. Sistem pinjaman mahasiswa pertama kali disahkan pada tahun 1240, oleh Uskup Lincoln di Universitas Oxford. Banyak universitas lain yang mengikutinya, tetapi butuh waktu hingga 1951 bagi pemerintah Kolombia untuk memulai skema pinjaman mahasiswa nasional pertama di dunia, yang masih beroperasi hingga 2021. Pinjaman mahasiswa dapat mengambil dua bentuk yang sangat berbeda, yang dibedakan berdasarkan bagaimana peminjam berkewajiban untuk melunasi utangnya. Pertama, dan yang paling umum, pembayaran pinjaman ditentukan berdasarkan waktu (sejumlah uang dilunasi dalam jangka waktu tertentu), seperti halnya semua pinjaman komersial. Pengaturan ini dikenal sebagai 'pinjaman pelunasan berbasis waktu' (TBRL), atau pinjaman 'hipotek'. Kedua, dan yang cukup berbeda, pinjaman wajib dilunasi jika dan hanya jika pendapatan debitor melebihi jumlah tertentu per periode, yang dikenal sebagai 'pinjaman kontinjensi pendapatan' (ICL).

Haruskah siswa berkontribusi terhadap biaya pendidikan tinggi negeri, atau haruskah pemerintah menanggung semua biaya? Meskipun sebagian besar pemerintah membebaskan biaya pendidikan untuk layanan universitas negeri, banyak negara di Eropa yang tidak membebaskan biaya pendidikan, termasuk Jerman, Swedia, dan Denmark. Penting untuk dicatat bahwa negara-negara ini tidak menawarkan pendidikan tinggi 'gratis', karena semuanya harus dibayar; sebaliknya, di negara-negara ini pendidikan tinggi gratis bagi siswa karena tidak ada biaya kuliah. Artinya, apa yang disebut 'pendidikan tinggi gratis' berarti semua biaya ditanggung oleh pembayar pajak. Pengalaman politik internasional kontemporer menggambarkan bahwa hal ini merupakan isu yang kuat. Sebagai contoh, masuk akal bahwa janji untuk menghapuskan biaya kuliah universitas oleh oposisi Partai Buruh di Inggris dan Selandia Baru dalam kampanye pemilihan umum baru-baru ini merupakan hal yang penting bagi keberhasilan mereka. Selain itu, di Amerika Serikat, negara bagian New York telah menghapus biaya kuliah untuk sebagian besar mahasiswa, dan kandidat Presiden dari Partai

Demokrat, Bernie Sanders di tahun 2019 mengusulkan hal yang sama untuk perguruan tinggi negeri di Amerika Serikat.

Meskipun terdapat beberapa kesepakatan dalam literatur mengenai konsep dan sifat dari eksternalitas pendidikan tinggi, pengukuran yang akurat terhadap nilai dari fenomena ini masih bersifat ilusi. Hal ini diilustrasikan oleh Chapman dan Lounkaew (2015), yang menganalisis beberapa ratus studi kasus empiris dan menemukan bahwa, bahkan dengan pengenalan asumsi yang cukup ketat, analisis tersebut masih dapat memberikan perkiraan yang masuk akal mengenai nilai eksternalitas pendidikan tinggi: antara 30% dan 70% dari biaya yang dikeluarkan untuk proses tersebut. Satu-satunya kesimpulan yang dapat kami pastikan adalah bahwa meskipun memang ada kasus limpahan sosial dari subsidi, ukuran yang tepat dari subsidi yang tersirat masih belum jelas. Bagi para ekonom, masalah apakah subsidi harus menutupi semua biaya (yaitu, biaya kuliah nol) secara umum dipandang sebagai masalah keadilan yang jelas. Konsensus yang ada adalah bahwa tidak membebaskan biaya kuliah untuk pendidikan tinggi negeri merupakan tindakan yang regresif, karena mayoritas pembayar pajak yang membiayai pendidikan tinggi negeri, yaitu mereka yang tidak lulus, rata-rata mengalami kerugian finansial selama masa hidup mereka, dibandingkan dengan mereka yang lulus. Pengamatan ini telah menjadi bagian dari literatur ekonomi kontemporer (misalnya, Barr, 1992), tetapi juga telah dibuat hampir 150 tahun yang lalu oleh Karl Marx di tahun 1875.

Pengenalan, atau peningkatan, biaya kuliah, dapat mendorong pemerintah untuk menyediakan dana untuk mempertahankan atau memperluas jumlah universitas negeri. Hal ini dikarenakan, dari perspektif anggaran, adanya biaya kuliah berarti pembiayaan pendidikan tinggi akan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan pemerintah per pendaftaran, menyiratkan bahwa dengan alokasi sumber daya anggaran pemerintah yang diberikan untuk pendidikan tinggi, biaya kuliah menghasilkan universitas yang didanai secara lebih luas. Bukti empiris yang penting dari Inggris konsisten dengan perspektif ini. Murphy, Wyness dan Scott-

Clayton (2018), dan Crawford, Claire, Dearden, Micklewright, dan Vignoles (2016) menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pendaftaran dan pendanaan per kapita mahasiswa setelah biaya kuliah pertama kali diperkenalkan kembali pada tahun 1998, dan sekali lagi ketika biaya dinaikkan menjadi £ 3.000 pada tahun 2006 dan £ 9.000 pada tahun 2012, didukung oleh ICL; selain itu, Crawford et al. (2016) mengilustrasikan bahwa peningkatan partisipasi terbesar di Inggris adalah pada mahasiswa dari latar belakang yang paling tidak beruntung. Temuan ini menyiratkan bahwa memperluas jumlah tempat pendidikan tinggi dalam sistem ICL merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan akses universitas bagi mereka yang kurang beruntung. Sebagai hasil dari kombinasi ketidakpastian dan kurangnya agunan yang dapat dijual, pasar pinjaman mahasiswa, jika dibiarkan berjalan dengan sendirinya, tidak akan memberikan hasil yang efektif atau adil untuk pembiayaan pendidikan tinggi; calon mahasiswa yang memiliki keterbatasan kredit tidak akan dapat mengakses pinjaman komersial. Akibatnya, tanpa campur tangan pemerintah, akan ada dua masalah: pembiayaan pendidikan tinggi yang kurang optimal dan ketidaksetaraan kesempatan pendidikan (Friedman, 1955). Maka tidak mengherankan jika di hampir semua negara, pemerintah mengintervensi pembiayaan pendidikan tinggi melalui penyediaan dan subsidi pinjaman mahasiswa.

Di dunia internasional, ada dua jenis pinjaman mahasiswa yakni TBRL (Time Based Repayment Loan) dan ICL. Yang pertama tidak mungkin dilakukan di Indonesia karena memiliki beban pembayaran yang tinggi. Pinjaman pemerintah untuk pendidikan biasanya mengambil salah satu dari dua bentuk pinjaman: pinjaman bergaya hipotek atau pinjaman kontinjensi pendapatan (ICL). Dalam kasus pinjaman bergaya hipotek, individu harus membayar kembali jumlah total pinjamannya ditambah bunga selama jangka waktu tertentu, yang menyebabkan wajib tetap pembayaran bulanan. Kerugian utama dari jenis pinjaman ini adalah bahwa pendidikan tinggi bukanlah jaminan bahwa seseorang akan memiliki kemampuan untuk membayar kembali, pinjaman ini dapat mengarah pada kesulitan

pembayaran kembali atau resiko gagal bayar, dan kerugian dari reputasi kredit selanjutnya. ICL dirancang untuk memberikan pilihan yang lebih adil bagi siswa. Pembayaran kembali pinjaman terkait dengan pendapatan, dengan cara individu membayar kembali dari sebagian dari pendapatan mereka, biasanya dengan harga tetap dalam jumlah waktu tertentu. Hal ini relative aman apabila diperhadapkan dengan beban pembayaran yang tinggi. Pinjaman jenis ini juga menurunkan resiko default, karena pemerintah secara otomatis dapat mengampuni saldo terutang setelah periode pembayaran sudah berakhir: ini disebut "hidden grant". Untuk alasan-alasan ini, ICL memiliki banyak pendukung di seluruh dunia, pinjaman ini dipandang sebagai sebuah cara untuk memberikan pendidikan tinggi gratis di titik masuk dan memastikan pembayaran kembali lancar dan adil.

ICL adalah skema ideal yang mungkin berhasil di Indonesia. Namun, bagi negara yang sangat berkembang seperti Indonesia untuk menemukan model yang tepat untuk skema kredit ini, terbilang cukup sulit. Keterjangkauan pinjaman adalah hal pertama yang terlintas dalam pikiran, sejauh mana skema pinjaman ini dapat digulirkan untuk memudahkan siswa. Hal kedua adalah kelayakan skema pinjaman ini; ia membutuhkan lebih dari sekadar pemerintah untuk membuat ini berhasil. Pertanyaannya adalah seberapa dalam bank swasta atau lembaga keuangan itu bisa menangani pinjaman ini. Mengingat berapa lama durasi dan kebijakan yang diperlukan untuk membuat pinjaman tepat guna dan sesuai dengan perilaku keuangan Indonesia. Hanya ada sekitar sepuluh juta pekerja yang memiliki gelar sarjana (Ristekdikti, 2018). Biaya pendidikan yang harus dibayar siswa sebelum mendaftar menjadi faktor utama yang menghalanginya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Pemerintah dan lembaga filantropi telah berkali-kali mencoba meluncurkan pinjaman mahasiswa, namun tidak satupun yang memenuhi harapan tersebut. Tingkat kredit macet sangat tinggi, tetapi siswa yang akan mendapatkan gelar universitas tidak akan tumbuh lebih tinggi jika mereka hanya

mengandalkan beasiswa. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi tantangan dalam mendapatkan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang adil adalah dengan meluncurkan pinjaman mahasiswa.

Meskipun Indonesia membutuhkan lebih banyak tenaga kerja berpendidikan tinggi karena pergeseran ekonominya dari pertanian ke jasa, sistem pendidikan tinggi tampaknya semakin tertekan oleh ekspansi jumlah mahasiswa yang sangat cepat. Tekanan ini paling jelas terlihat di tiga bidang: pendanaan, otonomi dan desain.

Pertanyaan pertama adalah bagaimana mendanai pendidikan tinggi, mengingat jumlah mahasiswa yang mendaftar melebihi kapasitas pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran. Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan tinggi di Indonesia hanya 0,3 persen dari PDB, jauh lebih rendah dibandingkan dengan Singapura (1,1 persen), Malaysia (1,7 persen), dan bahkan Vietnam (1,2 persen). Oleh karena itu, sektor ini sangat diprivatisasi. Dari sekitar 3.400 institusi pendidikan tinggi di Indonesia, kurang dari 100 institusi yang dikelola oleh pemerintah. Meskipun jelas terlihat ketidakmampuan pemerintah untuk meningkatkan belanja pendidikan tinggi, banyak orang Indonesia terus bersikeras bahwa pemerintah harus memainkan peran yang lebih besar dalam mendanai sektor ini. Selain itu, terdapat ekspektasi yang tidak masuk akal bahwa setiap individu harus memiliki pendidikan tingkat tersier.

Faktanya adalah bahwa pendidikan tinggi itu mahal terlalu mahal untuk mengharapkan pemerintah mengambil peran dominan dalam mendanai sektor ini. Namun demikian, pemerintah berkepentingan untuk memastikan akses yang baik terhadap pendidikan tingkat tinggi. Hal ini sangat relevan bagi masyarakat miskin, karena pendidikan tinggi memberikan manfaat pribadi yang besar yang dapat membantu anak-anak dari keluarga miskin untuk terbebas dari kemiskinan antargenerasi. Dengan mempertimbangkan semua aspek ini, cara yang paling efisien untuk membiayai pendidikan tinggi adalah melalui sistem pinjaman. Hal ini akan membantu mengatasi masalah kesetaraan, dengan memungkinkan mereka yang tidak

mampu membayar biaya pendidikan untuk meminjam dana yang diperlukan dan membayarnya kembali setelah lulus. Saat ini Indonesia belum memiliki sistem pinjaman pendidikan tinggi berskala besar.

Ada dua jenis utama sistem pinjaman pendidikan yang beroperasi di negara-negara lain. Yang pertama adalah pinjaman yang didukung oleh pemerintah yang disediakan oleh bank. Di bawah pengaturan 'tipe hipotek' ini, pembayaran pinjaman dilakukan berdasarkan jumlah yang telah ditentukan sebelumnya selama periode waktu tertentu. Ini adalah dasar pengumpulan yang digunakan untuk membantu membiayai pendidikan tinggi di banyak negara, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Filipina, dan Thailand. Jenis sistem yang kedua adalah pinjaman kontinjensi pendapatan (*income-contingent loan/ICL*), yang berbentuk komitmen mahasiswa untuk melunasi utang tergantung pada pendapatan mereka di masa depan. Skema seperti ini saat ini beroperasi di Australia, Selandia Baru, Inggris, Hungaria, Chili dan Korea Selatan. Karakteristik penting dari sistem ICL adalah bahwa beban pembayaran maksimum ditetapkan oleh undang-undang, untuk memfasilitasi perataan konsumsi dan menyediakan asuransi gagal bayar.

Tren pendanaan pendidikan tinggi menunjukkan bahwa ada pergeseran bertahap ke arah ketergantungan yang lebih besar pada kontribusi biaya mahasiswa, yang pada gilirannya didukung oleh pinjaman mahasiswa yang tersedia dengan mudah. Meskipun pendidikan tinggi sebagian besar harus dibiayai dari pengeluaran publik untuk menjamin kualitas pengajaran dan penelitian yang tinggi, catatan pendanaan publik menunjukkan bahwa kecil kemungkinan sumber daya tambahan, yang sepadan dengan kebutuhan, akan disediakan oleh pemerintah karena adanya klaim yang saling bersaing di bidang prioritas, yaitu pendidikan dasar. Pendekatan yang berorientasi pada siswa (konsumen) dalam menawarkan program studi dan pemulihan biaya pendidikan harus dikembangkan. Karena kebijakan pinjaman pendidikan yang ada saat ini tidak efisien, regresif dan tidak merata secara regional, maka kebijakan



pinjaman berdasarkan penghasilan harus diadopsi untuk memungkinkan semua pencari ilmu yang memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat dari program-program yang ditawarkan oleh universitas dan perguruan tinggi. Hubungan antara industri dan institusi harus diperkuat untuk memastikan pembagian sumber daya dan jaminan kualitas dan secara bersamaan memberikan insentif bagi pengembangan organik dari hubungan antara industri dan institusi. Fakta bahwa lembaga 'nirlaba' dalam hal apapun menghasilkan pendapatan yang besar untuk keuntungan pribadi, tidak ada alasan mengapa jendela baru lembaga 'nirlaba' tidak boleh dibuka untuk menambah sumber daya tambahan untuk membiayai pendidikan, penelitian, dan pelatihan yang relevan dan berkualitas tinggi. Pertimbangan efisiensi dan pemerataan menjadi alasan kuat bagi para penerima manfaat pendidikan tinggi untuk memberikan kontribusi yang lebih besar. Hal ini juga akan memungkinkan pendanaan pemerintah untuk ditargetkan secara lebih efektif untuk mendukung calon mahasiswa yang berasal dari latar belakang pendapatan yang lebih rendah di mana partisipasi mereka selalu rendah, meskipun ada pendidikan gratis atau berbiaya rendah. (Greenaway & Haynes, 2003)

Secara keseluruhan, kondisi pendidikan di Indonesia memberikan banyak alasan untuk optimis. Akses terhadap pendidikan di semua tingkatan terus meningkat, pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat untuk menginvestasikan sumber daya yang signifikan di sektor ini, dan sejumlah kebijakan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan sedang diuji dan diimplementasikan. Akan tetapi, masih banyak tantangan yang dihadapi. Kesenjangan akses pendidikan antara si kaya dan si miskin masih sangat lebar, kualitas pendidikan Indonesia masih sangat rendah menurut standar internasional, dan peningkatan sumber daya publik yang signifikan yang dialokasikan untuk sektor ini belum memberikan dampak yang nyata terhadap kualitas. Selain itu, masih terdapat ketidaksesuaian antara keterampilan yang dihasilkan oleh sistem pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja.

Pemerintah perlu memimpin dalam mengatasi tantangan-tantangan ini dengan menerapkan kebijakan berbasis bukti yang kuat. Selain itu, pemerintah mungkin perlu memberikan pengakuan yang lebih besar kepada, dan mulai lebih mengandalkan, sekolah-sekolah yang dikelola oleh swasta, terutama mengingat bahwa lembaga-lembaga swasta telah menjadi penyedia pendidikan tinggi yang dominan di negara ini.

Pinjaman mahasiswa adalah salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat. Namun, kekhawatiran muncul dengan keberadaan pinjaman mahasiswa tersebut adalah mahasiswa yang mengajukan pinjaman tidak dapat melunasi hutangnya, jadi pinjaman tersebut akan membebani kehidupan finansial mereka. Di banyak kasus banyak mahasiswa yang mengundurkan diri atau putus sekolah karena kesulitan keuangan yang tidak dapat diprediksi, khususnya masalah yang disebabkan oleh biaya sekolah yang lebih tinggi atau kurangnya kesempatan bagi siswa untuk mencari pekerjaan saat studi (Dimmera, 2019). Hal ini menarik jika dihubungkan dengan rasio gini yang walaupun cenderung menurun tetapi tidak merubah kontur ekonomi, hal ini diilustrasikan menurut gambar berikut:

**Gambar 1.1**

**Rasio Gini Indonesia per 2020**



*Gambar 1.1 Gini Ratio*

Sumber: Badan Pusat Statistik 2021

Rasio gini diatas menunjukkan bagaimana ketimpangan ekonomi di Indonesia membagi masyarakat dengan kelas sosial yang berbeda. Implikasinya adalah ada golongan masyarakat

yang terisolir dari akses akses kesempatan pendidikan karena kesulitan memenuhi pembiayaan penyelenggaraan pendidikan. Metrik rasio yang dapat dilihat kembali adalah yang dipublish oleh International Institute for Management and Development yang menempatkan Indonesia mengisi peringkat 58 untuk Education competitiveness di Asia. Hal ini menunjukkan ketertinggalan Pendidikan di Indonesia.

Elmira & Suryadarma (2020) menguji kelayakan sistem pinjaman kontinjensi dari pendapatan untuk membiayai pendidikan tinggi di Indonesia. Dengan menggunakan data pendapatan lulusan yang diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2015, Elmira memodelkan distribusi pendapatan siklus hidup lulusan universitas dan menggunakan regresi kuantitatif. Kami menggunakan perkiraan ini untuk mensimulasikan berbagai skema pinjaman kontinjensi pendapatan (ICL) untuk mengamati pengaruhnya terhadap jumlah pembayaran kembali. Lama pembayaran kembali, subsidi pemerintah, dan beban pembayaran kembali pria dan wanita dalam jumlah pendapatan yang berbeda. Mereka mensimulasikan tiga skema pinjaman: tanpa bunga riil, dengan biaya tambahan 25% dari total pinjaman, dan dengan bunga riil 2%. Pemerintah memiliki subsidi implisit terendah, dengan skema biaya tambahan 25%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ICL dengan beban pembayaran yang lebih rendah layak dilakukan di Indonesia dan dapat meningkatkan akses pendidikan tinggi. Studi itu juga membahas kapasitas administrasi di antara otoritas pajak.

Karena semakin banyak siswa meminjam untuk membiayai pendidikan tinggi mereka, dan banyak dari mereka menunda pembayaran atau bahkan gagal bayar, baik pemerintah maupun pemberi pinjaman swasta prihatin tentang pengembalian yang diharapkan dari pinjaman yang mereka berikan dan apakah jumlah yang mereka kumpulkan sebagai pembayaran akan menutupi jumlah yang mereka pinjamkan. Hal ini sangat penting ketika mempertimbangkan penyesuaian program pinjaman atau perubahan kelompok siswa yang meminjam. Di bawah skema pinjaman pelajar pemerintah, peminjam biasanya ditawarkan kontrak

yang sama dengan suku bunga dan rencana pembayaran yang sama. Meskipun ada beberapa pengecualian, kontrak bisa tidak bergantung pada aspek lain dari peminjam seperti bidang studi atau institusi kehadiran mereka. Mengingat pendapatan pasca-sekolah dan, oleh karena itu, potensi untuk membayar kembali terkait erat dengan ini faktor (Rumberger & Thomas, 1993; Loury & Garman, 1995; Altonji, Blom, & Meghir, 2012), pengembalian yang diharapkan dari pinjaman mahasiswa kemungkinan besar akan bergantung pada karakteristik ini juga dan akan menjadi heterogen antar individu.

Heterogenitas dalam pengembalian yang dapat diprediksi di seluruh siswa menimbulkan kekhawatiran tentang efisiensi program pinjaman siswa dan menyiratkan subsidi silang *ex ante*, di mana peminjam dengan pengembalian yang diharapkan tinggi secara efektif mensubsidi mereka yang memiliki pengembalian yang diharapkan rendah. Selain itu, terdapat kekhawatiran seleksi yang merugikan bahwa kreditor swasta dapat melemahkan program pinjaman pemerintah dengan *krim skimming*, yaitu memburu jenis peminjam yang menguntungkan dan meninggalkan pemerintah dengan jenis peminjam yang tidak menguntungkan (Bachas, 2019). Hal ini dapat meningkatkan biaya program, memaksa pemerintah untuk menaikkan suku bunga pinjaman mahasiswa atau mensubsidi kumpulan yang tersisa. Suku bunga yang lebih tinggi kemungkinan akan mendorong peminjam dengan keuntungan tinggi tambahan, yang mengarah ke kumpulan yang bahkan lebih dipilih secara negatif.

Pendidikan tinggi sekuler di Indonesia memiliki sejarah yang relatif singkat. Hal ini dimulai dengan pendirian sekolah tinggi oleh pemerintah kolonial Belanda yang melatih penduduk asli dalam bidang kedokteran dan teknik. Sebelum sistem pendidikan kolonial, pendidikan tinggi dikenal dan hanya diketahui sebagai institusi pendidikan keagamaan yakni untuk mempelajari ilmu agama saja. Pertumbuhan pendidikan tinggi pasca kemerdekaan, berlangsung sangat cepat. Sejak disahkannya Undang-Undang Pendidikan yang pertama pada

tahun 1961, pendidikan tinggi Indonesia terus mengalami perkembangan pesat. Perkembangan pendidikan tinggi tumbuh selama periode 1970-an hingga 1990-an, ketika Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat, didorong oleh lonjakan harga minyak dan kinerja ekspor nonmigas yang solid. Wicaksono dan Friawan (2011) mencatat jumlah mahasiswa di perguruan tinggi (PT) meningkat dari sekitar 200.000 mahasiswa pada tahun 1975 menjadi 2,5 juta mahasiswa pada tahun 1995. Pada tahun 2005, terdapat hampir 2300 PT (perguruan tinggi) yang terdiri dari 86 PT publik dan sekitar 2200 PT swasta. Lebih dari 3,5 juta siswa dididik di perguruan perguruan tinggi ini.

Meskipun tren penambahan mahasiswa ini memberikan sinyal yang baik, beberapa pendapat dari para ahli membahas masalah penting di balik Perguruan Tinggi yang berkembang. Moeliোধhardjo (2014), misalnya, berargumen bahwa pesatnya ekspansi PT tidak sejalan dengan perencanaan dan mekanisme pendanaan yang tepat. Sistem pendidikan tinggi telah mengalami inefisiensi internal dan inisiatif yang buruk karena sistem pendidikan yang terpusat. Selain itu, ketergantungan birokrasi pada otoritas pusat membuat PT (khususnya PT Negeri atau Publik) tidak mampu merespon perubahan eksternal atau menerima dukungan yang sesuai. Lebih lanjut, PT publik tidak memiliki rasa akuntabilitas publik, karena menurut struktur birokrasi, mereka adalah bagian dari lembaga pemerintah di bawah Departemen Pendidikan Nasional.

Meskipun terjadi peningkatan yang cepat dalam belanja publik, pemerintah Indonesia masih membelanjakan porsi yang lebih kecil dari PDB untuk pendidikan dibandingkan dengan sebagian besar negara berpenghasilan menengah lainnya. Tingkat pengeluaran ini juga masih rendah dibandingkan dengan banyak negara lain di Asia Timur dan negara lainnya. Dengan 3,7 persen dari PDB, Indonesia membelanjakan lebih sedikit dibandingkan Thailand, Vietnam, atau Malaysia, dan setengah dari jumlah yang dibelanjakan oleh negara-negara berpenghasilan

tinggi dan berkinerja tinggi seperti Norwegia. Indonesia memiliki kinerja yang baik jika dibandingkan dengan negara-negara berpenghasilan rendah di kawasan ini, dengan porsi PDB yang lebih tinggi untuk pendidikan dibandingkan dengan Laos, Kamboja, atau Filipina. Namun, dibandingkan dengan kekayaannya, pengeluaran Indonesia masih rendah, terutama dalam hal pendidikan menengah. Dalam hal PDB per kapita, Indonesia membelanjakan lebih sedikit per siswa dibandingkan sebagian besar negara maju dan negara-negara Asia lainnya. Indonesia berada di ujung bawah distribusi yang ditunjukkan dalam hal pengeluaran per kapita untuk pendidikan dasar dan menengah. Dalam hal pendidikan dasar, Indonesia berada di atas Filipina, dan hanya sedikit di bawah Meksiko dan Malaysia, namun masih tertinggal tidak hanya dari rata-rata negara berpendapatan tinggi, tetapi juga dari pengeluaran per kapita beberapa negara berpendapatan menengah seperti Vietnam dan Thailand. Perbedaan untuk pendidikan menengah lebih jelas; hanya Filipina dan Thailand yang membelanjakan lebih sedikit daripada Indonesia.

Ketika pengeluaran swasta dimasukkan ke dalam total sumber daya yang dikhususkan untuk pendidikan di Indonesia, skala peningkatan sumber daya menjadi lebih mengesankan. Total pengeluaran untuk pendidikan dari sumber-sumber publik dan swasta meningkat dari sekitar 3 persen dari PDB pada tahun 2001 menjadi lebih dari 5 persen dari PDB pada tahun 2010. Bahkan, pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan tumbuh lebih cepat daripada pengeluaran publik, yang menghasilkan porsi yang lebih besar dari rumah tangga dalam total pengeluaran pendidikan meskipun terjadi peningkatan besar-besaran dalam sumber daya publik. Rumah tangga berubah dari yang sebelumnya hanya menyumbang 20 persen dari total sumber daya pada tahun 2001 menjadi lebih dari 30 persen pada tahun 2010. Peningkatan ini sebagian besar disebabkan oleh perluasan akses ke pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi, yang bergantung pada biaya dan dukungan keuangan lainnya dari rumah tangga.

Hasil terbesar dari peningkatan pengeluaran untuk pendidikan di Indonesia adalah perluasan akses pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin. Kemajuan dalam hal akses dan pemerataan sangat pesat sejak tahun 2006, dengan anak-anak dari keluarga miskin yang mendaftar lebih awal dan bertahan lebih lama di sekolah. Persentase anak usia 15 tahun dari kuintil konsumsi termiskin yang terdaftar di sekolah meningkat dari lebih dari 60 persen pada tahun 2006 menjadi hampir 80 persen pada tahun 2010. Namun, agenda pemerataan masih belum lengkap: di atas usia 15 tahun, proporsi siswa dari kuintil termiskin yang bersekolah turun drastis, dan pada usia-usia yang terkait dengan pendidikan tinggi, proporsi siswa dari kuintil termiskin yang bersekolah turun menjadi kurang dari 2 persen. Penurunan proporsi siswa dari kuintil terkaya yang terdaftar di pendidikan tinggi juga sama mengkhawatirkannya. Hanya 45 persen anak berusia 19 tahun dari kuintil terkaya yang terdaftar di tahun 2010, sebuah angka yang mengkhawatirkan, yang tidak berubah sejak tahun 2006.

Indonesia telah mengambil sejumlah langkah penting untuk mentransformasi sistem pendidikannya agar dapat memenuhi kebutuhannya sebagai negara berpenghasilan menengah yang sedang berkembang pesat. Reformasi yang telah dilakukan memiliki cakupan yang luas, dan dampaknya mungkin tidak sepenuhnya bekerja dalam sistem pendidikan untuk beberapa waktu ke depan. Namun demikian, riset ini telah menunjukkan bahwa reformasi dan peningkatan pengeluaran yang dihasilkan telah menimbulkan beberapa hasil yang tidak diharapkan yang mengancam efektivitas proses reformasi. Pemerintah dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah merespons dengan cepat terhadap pengalaman-pengalaman implementasi ini. Mengatasi tantangan-tantangan yang disoroti dalam studi ini dan melanjutkan pembuatan kebijakan yang responsif ini sangat penting jika investasi di bidang pendidikan di masa depan akan menghasilkan keterampilan dan pengetahuan yang sangat penting bagi kelanjutan pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia.

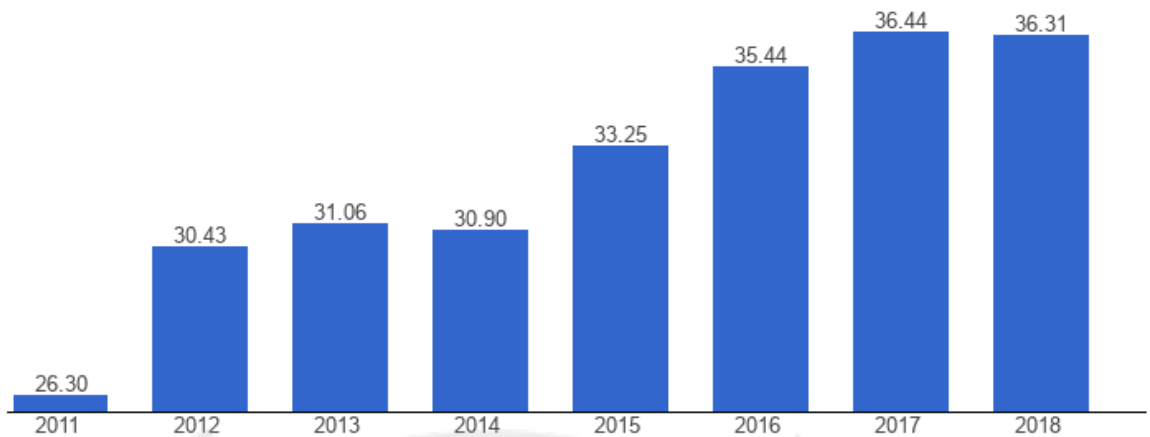
Studi studi yang mengulas hal ini merupakan upaya untuk menguraikan karakteristik utama di sektor pendidikan tinggi di Indonesia dan meninjau perkembangan kebijakan utama pemerintha yang mempengaruhi mekanisme keuangan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi selama beberapa dekade terakhir. Kebijakan kebikana ini akan memberikan perhatian khusus pada peran efektif sebuah skema dimana pendanaan pemerintah dan jenis pengaturan pinjaman mahasiswa dapat bertemu di satu titik penyelesaian. Tulisan ini akan membahas solusi struktur pembiayaan pendidikan tinggi di Indonesia. Fokusnya pada akses dan pemerataan layanan pendidikan tinggi, serta mengkaji beberapa isu terkait mekanisme pembiayaan pendidikan tinggi di Indonesia, termasuk tren umum dan komposisi pembiayaan sumber dana, resiko. dan regulasi yang diharapkan.

Pendidikan tinggi Indonesia menyaksikan ekspansi besar-besaran dalam pendidikan tinggi pasca kemerdekaan. Pada masa kolonial, penyelenggaraan PT sangat sedikit di negara ini. Lembaga-lembaga ini dirancang untuk memberikan pelatihan profesional kepada masyarakat setempat terutama di bidang kedokteran dan teknik. Program akademik dan penelitian tidak didirikan saat ini. Karena stratifikasi sosial di masa kolonial, hanya ada siswa dari kelompok elit yang terdaftar di universitas. Diperkirakan hanya 200 mahasiswa yang terdaftar di perguruan tinggi pada masa colonial. Pasca kemerdekaan, iklim politik dan semangat kebangsaan membuat negara ini bercita-cita untuk memiliki setidaknya satu universitas negeri di setiap provinsi. Sekitar 23 HEI baru didirikan selama tahun 1960-an, dan lembaga-lembaga ini mencakup hampir 26 provinsi di Indonesia. Kebijakan ini telah membawa pendidikan tinggi ke skala massal. Namun jika melihat tingkat enrolment Pendidikan tinggi, Indonesia perlu kebijakan luar biasa untuk mendongkrak angka partisipasi Pendidikan tinggi, hal ini tergambar pada grafik dibawah ini.

### **Gambar 1.2**

#### **Enrolment Rate of Tertiary education in Indonesia**





Gambar 1.2 Gini Ratio di Indonesia

Sumber: World Bank, 2018

Permintaan akan pendidikan meningkat pada tahun 1970-an, yang sejalan dengan pergeseran ekonomi dari sektor tradisional ke sektor yang lebih modern. Perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi berkat percepatan proses industrialisasi di industri ekspor. Proses ini menyebabkan meningkatnya permintaan akan tenaga kerja terampil, terutama lulusan sains dan teknologi. Karena pemerintah hanya dapat memberikan dukungan terbatas untuk pendidikan tinggi, pada tahun 1975, pemerintah membuat perubahan besar pada sistem pendidikan tinggi. Pada tahun 1975, Departemen Pendidikan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) menetapkan kerangka pengembangan pendidikan tinggi. Kerangka kerja ini berfungsi sebagai panduan dasar untuk standarisasi sistem pendidikan tinggi nasional. Ini mencakup struktur program akademik (sarjana dan pascasarjana), tata kelola, dan peran dan tanggung jawab anggota fakultas.

## 1.2. Perumusan Masalah

1. Apakah Student Loan dapat diterapkan di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk dari Student Loan yang akan diterapkan agar feasible?

3. Bagaimana penerapan dan landasan pelaksanaan bagi lembaga Pendidikan agar semua stakeholder dapat memitigasi resiko default dari program student loan ini?

### **1.3. Keaslian Penelitian**

Diyakini oleh peneliti bahwa riset tentang menemukan pinjaman yang tepat bagi mahasiswa di Indonesia dengan mengukur perilaku keuangan sangat terbatas dan hanya memiliki sedikit literatur yang membahas student loan secara personal. Penelitian ini meneruskan beberapa temuan yang dilakukan oleh Elmira dan Suryadarma (2020), Chapman dan Suryadarma (2013) dan Nahdi et al (2024). Penelitian ini mengeksplor hal hal yang belum disentuh oleh Elmira dan Suryadarma (2020) seperti variasi program studi, perbedaan distribusi pendapatan antara perempuan dan laki laki pada studi Nahdi et al (2024) juga memberikan gambaran yang bersifat empiris sesuatu yang hanya berhenti pada level konseptual pada studi Chapman dan Suryadarma (2013)

### **1.4. Urgensi (Kepentingan) Penelitian**

Indonesia, sebuah negara yang beragam dan berkembang pesat, mengalami pertumbuhan yang signifikan di sektor pendidikan. Dengan meningkatnya jumlah siswa yang menempuh pendidikan tinggi, permintaan akan dukungan finansial pun meningkat. Namun, sistem pinjaman pendidikan di Indonesia masih belum berkembang, sehingga menimbulkan tantangan bagi mahasiswa, keluarga, dan perekonomian secara luas. Ada kebutuhan mendesak untuk meneliti dan mengembangkan kerangka kerja pinjaman mahasiswa yang komprehensif yang dapat secara efektif mendukung aspirasi pendidikan mahasiswa Indonesia.

Lanskap pendidikan tinggi di Indonesia terus berkembang. Pemerintah telah melakukan investasi besar untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan, namun masih banyak mahasiswa yang menghadapi kendala keuangan. Menurut data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, rasio partisipasi kasar dalam pendidikan tinggi telah meningkat, tetapi kendala keuangan masih menjadi hambatan yang signifikan bagi banyak keluarga.

Tidak seperti banyak negara lain yang memiliki sistem pinjaman pendidikan yang mapan, pilihan bantuan keuangan di Indonesia masih terbatas. Beasiswa dan hibah tersedia tetapi tidak cukup untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat. Pinjaman swasta, meskipun tersedia, sering kali memiliki suku bunga yang tinggi dan persyaratan pembayaran yang ketat, sehingga membuat banyak orang enggan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kesenjangan ini menyoroti kebutuhan mendesak akan sistem pinjaman mahasiswa yang terstruktur dan mudah diakses.

Berinvestasi dalam pendidikan memiliki manfaat ekonomi yang luas. Individu yang berpendidikan berkontribusi lebih signifikan terhadap perekonomian, memiliki potensi penghasilan yang lebih tinggi, dan lebih siap untuk berinovasi dan mendorong pertumbuhan. Sebaliknya, kurangnya dukungan keuangan untuk pendidikan dapat menyebabkan siklus kemiskinan, membatasi peluang untuk mobilitas sosial dan pembangunan ekonomi. Meneliti dan menerapkan sistem pinjaman pendidikan yang kuat dapat membantu menjembatani kesenjangan ini, mendorong masyarakat yang lebih terdidik dan bergairah secara ekonomi.

Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia memiliki sejarah panjang dalam sistem pinjaman mahasiswa yang, terlepas dari kekurangannya, menawarkan pelajaran berharga. Sistem-sistem ini memberikan wawasan untuk merancang pinjaman dengan persyaratan yang menguntungkan, rencana pembayaran yang dapat diatur, dan perlindungan terhadap gagal bayar. Dengan mempelajari model-model tersebut, Indonesia dapat mengembangkan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang unik dari populasi mahasiswa.

Sehingga melakukan riset pada topik student loan di Indonesia dapat mengembangkan sistem pinjaman pendidikan di Indonesia membutuhkan pertimbangan yang cermat terhadap beberapa faktor:

1. Memastikan bahwa pinjaman dapat diakses oleh semua siswa, terlepas dari latar belakang keuangan mereka.
2. Menciptakan rencana pembayaran yang fleksibel dan mudah diatur, sehingga tidak membebani para lulusan.
3. Peraturan dan Pengawasan: Menetapkan kerangka kerja regulasi yang kuat untuk mengawasi pencairan dan pembayaran kembali pinjaman, meminimalkan risiko gagal bayar dan salah urus keuangan.
4. Kesadaran Publik: Mengedukasi mahasiswa dan keluarga mengenai ketersediaan dan manfaat pinjaman mahasiswa, serta bagaimana cara mengelolanya secara bertanggung jawab.

Penelitian ini sangat penting untuk merancang sistem pinjaman mahasiswa yang efektif.

Bidang-bidang utama yang menjadi fokus harus mencakup:

1. Analisis Ekonomi: Memahami kemampuan keuangan mahasiswa dan keluarga mereka, dan dampak ekonomi dari utang mahasiswa.
2. Studi Perbandingan: Menganalisis sistem pinjaman mahasiswa di negara lain untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan potensi jebakan.
3. Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Berkonsultasi dengan mahasiswa, pendidik, lembaga keuangan, dan pembuat kebijakan untuk mengembangkan pendekatan yang menyeluruh.
4. Program Percontohan: Menerapkan program pinjaman percontohan untuk menguji kelayakan dan efektivitas sebelum diluncurkan secara nasional.

Urgensi untuk meneliti dan mengembangkan sistem pinjaman pendidikan di Indonesia tidak dapat ditawar-tawar lagi. Dengan mengatasi hambatan keuangan untuk pendidikan tinggi, Indonesia dapat membuka potensi penuh dari penduduk mudanya, mendorong pembangunan sosial-ekonomi dan mendorong masyarakat yang lebih adil. Penelitian yang komprehensif merupakan langkah awal untuk menciptakan sistem student loan yang berkelanjutan dan efektif untuk memberdayakan mahasiswa dan memperkuat masa depan bangsa.

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi model pinjaman bagi mahasiswa di Perguruan tinggi dengan deskripsi di bawah ini:

1. Tujuan Penelitian ini yang pertama adalah menemukan bukti empirik bahwa student loan ini dapat diterapkan di Indonesia.
2. Jika ditemukan bukti empirik bahwa student loan dapat diterapkan maka tujuan kedua penelitian ini adalah menemukan model pinjaman yang tepat untuk dapat diselenggarakan di Indonesia.

3. Ketiga menemukan system skema pinjaman yang memberi perlindungan pada mahasiswa dan mampu memitigasi resiko gagal bayar saat masa peminjaman berlangsung

